

Merawat Khittah "Politik" Muhammadiyah

BADRI CHANIAGO

Essen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas /
Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Cabang IV Angkek Padusunan, Kota
Pariaman

LEBIH Awal pada tanggal 3 Agustus yang lalu membertitikan tentang bergabungnya Bapak Sofwan Karim Ilha (Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar) menjadi salah seorang anggota dewan penasehat Forum Komunikasi Relawan Pemenangan Jokowi (FKPRI) di Sumbar. Pilihan sikap yang beliau tempuh ini tak ayal lagi telah menimbulkan perdebatan di kalangan internal, terutama di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah Sumbar, karena status beliau sebagai "ketua" Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar. Seperti biasa, tentu saja ada yang bersikap *pro* dan *kontra*, dan ada pula yang memilih *netral*. Walau apapun, semua kalangan harus menghormati pilihan sikap politik beliau, karena hal itu merupakan hak konstitusional sebagai warga negara. Tulisan sederhana ini tidaklah dimaksudkan sebagai "*pledoi*" ataupun "menyerang" pilihan sikap yang beliau tempuh, namun hanya mencoba menelusuri persoalan seperti ini dari sisi khittah Muhammadiyah.

Sebagaimana lazimnya kompetisi dalam politik elektoral, tentu kandidat akan berusaha segala daya upaya merangkul simpati dari segala segmen politik, yang salah satunya selalu menjadi target dalam setiap peraturan politik elektoral di negeri ini adalah: Warga Persyarikatan Muhammadiyah. Ini wajar saja, karena sebagai salah satu organisasi "Islam berkemajuan" terbesar di Indonesia, posisi Muhammadiyah sangatlah strategis. Dengan jaringan organisasi dan jumlah anggota serta simpatisan yang tersebar di berbagai wilayah, Muhammadiyah merupakan lumbung suara potensial. Muhammadiyah dapat dianalogikan seperti: seorang gadis cantik yang merupakan seorang anak tunggal dari ayah yang "batu" dan ibu yang "kayu", maka ayahnya pun disegani orang-pula di nagari. Laki laki mana yang tak akan berusaha untuk mempersuntingnya? Kalau sudah begini, *tak kayu jangan dikapang*, kata orang-orang *satuak*!

sure group (kelompok penekan), yang melakukan kontrol sosial dan dukungan sosial terhadap proses pembangunan. Muhammadiyah itu tidak hura politik, tidak rakut politik, tetapi bukan organisasi politik. Hasil Tanwir tahun 2003 di Denpasar menghasilkan "Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara", yang mempertegas bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi manapun. Dalam bahasa sederhana bisa dipahami bahwa Muhammadiyah itu "tidak ke mana-mana," tidak berpihak kepada kekuatan politik atau partai politik tertentu. Namun, Muhammadiyah itu "ada di mana-mana," menjalin komunikasi dengan segala segmen politik dalam konteks politik *adiluhung* (*high politic*), dan berusaha melakukan pencangkokan (*implantasi / transplantasi*) para kader terbaiknya untuk berkibrah dalam politik kebangsaan, demi menuju kehidupan negara dan bangsa yang *baldatum thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Sungguhpun demikian, Muhammadiyah tetap menganggap penting perjuangan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* di ranah politik dengan orientasi kekuasaan *rit* seperti di partai politik dan lembaga legislatif (*low politic*). Para kader dan warga Muhammadiyah diberi kebebasan untuk mengekspresikan sikap dan pilihan politik, serta terjun ke dalam politik praktis, sepanjang tidak membawa embel-embel dan simbol Muhammadiyah. Dalam konteks ini, SK PP Muhammadiyah Nomor 41/KEP/LO BBI/2013 Tentang Perubahan Ketentuan Pencalonan Dalam Pemilu Dan Pemilihan Dari Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah telah mengatur dengan tegas bahwa: *Pertama*, bagi kader dan warga persyarikatan Muhammadiyah yang

gan Persyarikatan/Amal Usaha Muhammadiyah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/ DPRD dinyatakan berhenti dari jabatan dan statusnya sebagai anggota Pimpinan Persyarikatan dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di Amal Usaha Muhammadiyah, baik yang bersangkutan berhasil maupun tidak berhasil dalam pencalonan tersebut. Pemberhentian atau reposisi sebagaimana di maksud di atas, berlaku sejak ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU/KPUD). Kemudian, *Kedua*, apabila terdapat Anggota Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya dalam lingkungan Muhammadiyah yang menjadi anggota Tim Sukses dalam pencalonan anggota DPR RI / DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah RI, serta Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Walikota/Wakil Walikota. Dan Calon Bupati/Wakil Bupati, maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan dari jabatannya sampai selesai kegiatan Pemilu/Pemilukada. Para pengurus Muhammadiyah non aktif sementara ini, dilarang melibatkan Organisasi dan Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah untuk kepentingan politik pilleg dan pilkada. Juga dilarang menggunakan lambang/symbol, fasilitas, dana, dan infrastruktur yang dimiliki Persyarikatan dan Amal Usaha dalam kegiatan Pilleg / Pilpres/ pilkada tersebut. Penonaktifan atau pengaktifan kembali dilakukan melalui Surat Keputusan oleh Pimpinan Persyarikatan atau Amal Usaha yang mengangkatnya.

Sehubungan dengan Pilleg dan Pilpres tahun 2019 yang akan datang, hendaknya para penggerak organisasi Muhammadiyah berupaya sedaya upaya untuk "merawat" khittah Muhammadiyah ini, dengan tidak membawa

politik terhadap kandidat yang n gatasnamakan Muhammadiyah cara kelembagaan, karena bertentangan dengan khittah Muhammadiyah sebagai *rule of g* ketika berinteraksi dengan dinan politik praktis. Menjalni komuni dan silaturahmi dengan para kand adalah baik, yang salah satu bentuk bisa saja menghadirkan mereka da Muhammadiyah. Namun semua harus dilakukan dengan adil, den cara memberikan kesempatan y sama terhadap kandidat. Itu j dalam rangka untuk memberik formasi tentang figur kandidat kep waga Muhammadiyah sebagai pe lih, bukan untuk menggagal duk gan, apalagi untuk menyatukan di ngan politik warga Muhammadiyah pada kandidat tertentu. Jangan s melakukan *fait accompli*, mengata makan persyarikatan dalam memli kan dukungan politik kepada kandi karena hal ini akan menebar be perpecahan internal, karena kader, warga Muhammadiyah itu ti *monolitik*, memiliki berbagai i timbangan dan trisan dalam men tukan pilihan politiknya. Selain jangan hanya karena alasan un "membangun jembatan hati" d gan kandidat, kemudian "okn elit Muhammadiyah melakukan aya-me Muhammadiyah-kan kar dat tersebut, agar dianggap sebi "orang Muhammadiyah" dengan juan untuk memperoleh dukun dari kader dan warga persyarikata

Dalam momen eletoral pilleg (pilpres yang akan datang, "konsiste segenap elit dan pengurus Muhi madiyah dan ortomnya diuji, apal sanggup mematuhi Khittah Muhi madiyah, atau malah sebaliknya ter da dan menabak rambu rambu y ada. Sebagai hasil ijthad politik, khit politik Muhammadiyah merupal pedoman bagi seluruh kader Muhi madiyah dan ortom ortomnya dal berinteraksi dengan realitas pol praktis.

Konsistensi para elit dan pengu Muhammadiyah dan jajaran ort serta amal usahanya untuk ment dan "merawat" khittah Muhamu isah adalah mutlak. Untuk mese